



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 34 /KPTS-BPT-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa penilaian Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan degerasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 maka perlu dibentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap Tim Kerja Indeks Refomasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 maka dibentuk dengan Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. sekretariat bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 27 Januari 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUKHAMIS BASYIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/34 /KPTS-BPT-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Mukhamis Basyir, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2	Etalisna Syanur, SH	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
3	Zahara, SH	Penyusun Materi Hukum dan PerUndang-Undangan	Anggota
4	Ainun Najah, SH	Penyusun Materi Hukum dan PerUndang-Undangan	Anggota
5	Wingga Sandila, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
6	Febri Wirmon, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7	Army Oktafianus	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat
8	Intan Purwoningsih	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR